

PENTINGNYA PERTIMBANGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PENETAPAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN DALAM *CONCEPTUAL FRAMEWORK* PELAPORAN KEUANGAN INDONESIA

*Suwardiman*¹⁾

Abstract

Conventional financial statements focus on the results of business transactions. Exchanges between a firm and its social environment are practically ignored. Exchanges between a firm and society consist primarily of the use of social resources. If the activities of a firm lead to a depletion of social resources, the result is a social cost, and if they lead to an increase in social resources, the result is a social benefit.

The responsibility of the social costs and social benefits of a business entity is held on the management. However, there is no a framework that can be based on as a guideline to measure and report the social costs and social benefits. Therefore, there are not accounting standards (particularly in Indonesia) for the social costs and social benefits. It is difficult to measure the management responsibility in an accounting report for the social costs and social benefits without the standards. Because of an accounting standard is derived from a conceptual framework, it is needed to develop the conceptual framework for financial reporting that is socially concerned.

This paper discusses how to develop the objectives of financial reporting by considering the management responsibility on the social costs and social benefits that are always created by a business entity. Since the social welfare is our goal, accounting must support the attempts to reach this goal. It can be started from considering the social responsibility of business entities in the setting of the objectives of financial reporting as the main part of a conceptual framework for financial reporting.

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan perekonomian dan masyarakat luas, sehingga suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada investor dan kreditor, tetapi juga kepada golongan masyarakat luas yang lain. Badan usaha yang besar sebenarnya merupakan semacam lembaga masyarakat yaitu wadah untuk bekerja sama dalam menjalankan perusahaan berskala besar (Suwardjono 1989, hal. 25).

¹⁾ adalah staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Badan usaha (perusahaan) menarik dana dari berbagai individu dalam masyarakat, dengan berbagai hak yang melekat di dalamnya, hal ini menjadikan badan usaha bertanggung jawab kepada kelompok masyarakat yang terdiri atas para investor dan kreditor. Badan usaha (perusahaan) memperkerjakan sejumlah besar pegawai dan buruh dengan masing-masing perjanjian kerja, hal ini menjadikan badan usaha bertanggung jawab kepada kelompok masyarakat yang terdiri atas pekerja dan organisasinya (serikat pekerja). Badan usaha (perusahaan) memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan konsumen, hal ini menjadikan badan usaha bertanggung jawab kepada kelompok masyarakat konsumen yang peka terhadap kualitas dan perubahan harga. Badan usaha (perusahaan) berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah, hal ini menjadikan badan usaha bertanggung jawab kepada pemerintah dan kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan pemerintah. Badan usaha (perusahaan) dalam beraktivitas menggunakan sumber daya alam, menimbulkan polusi air, tanah, dan udara, hal ini menyebabkan badan usaha bertanggung jawab terhadap kualitas lingkungan alam dan sosial kepada pemerintah dan masyarakat. Tanggung jawab-tanggung jawab perusahaan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen, yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi nasional.

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali terhadap aktivitas suatu unit usaha. Tanggung jawab manajemen tidak hanya terbatas atas pengelolaan dana ke dalam perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Pertukaran-pertukaran yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta manfaat sosial (*social benefits*) dan biaya sosial (*social costs*) yang ditimbulkannya merupakan sisi aspek sosial pertanggungjawaban manajemen. Dalam hal ini tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan dalam SAK 1994 belum mampu mencakup tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karenanya perlu ada usaha pengembangan tujuan pelaporan keuangan yang mempertimbangkan tanggung jawab perusahaan kepada investor, kreditor, serta kepada lingkungan sosialnya. Dengan demikian diharapkan akuntansi mampu memenuhi fungsinya sebagai alat pertanggungjawaban secara lengkap.

Tujuan pelaporan keuangan mempunyai kedudukan tertinggi sebagai bagian dari kerangka acuan konseptual, yang akan membawa konsekuensi kepada standar dan praktik akuntansi. Tujuan pelaporan keuangan oleh FASB ditetapkan atas dasar kondisi ekonomi, hukum, politik, dan lingkungan sosial di Amerika Serikat. Proses penetapan tujuan pelaporan keuangan harus mendasarkan pada tujuan sosial

ekonomi setempat. Hal tersebut dikarenakan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari tanggung jawab perusahaan sebagai pelaku ekonomi untuk ikut serta mencapai tujuan sosial ekonomi nasional. Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen tidak akan relevan lagi jika hanya menyangkut hubungan antara perusahaan dengan investor dan kreditor, tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi aspek yang harus dipertimbangkan dalam suatu penetapan tujuan pelaporan keuangan.

Sejarah standar akuntansi di Indonesia paling tidak telah mengalami tiga kali perubahan yang penting, yaitu dari PAI 1974 menjadi PAI 1984 dan akhirnya menjadi SAK 1994. Tujuan pelaporan keuangan tidak dinyatakan secara sadar dalam standar-standar tersebut sebagai bagian yang akan sangat berpengaruh dalam standar dan praktik akuntansi di Indonesia. Jika akuntansi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan suatu organisasi ekonomi dan organisasi ekonomi itu sendiri adalah suatu alat untuk mencapai tujuan nasional, maka tujuan pelaporan keuangan harus diderivasi dari tujuan sosial ekonomi nasional. PAI 1974 dan PAI 1984 merupakan derivasi dari APB *Statement no 4*, dan SAK 1994 merupakan adopsi dari *International Accounting Standards*. Proses penetapan tujuan pelaporan keuangan seperti yang dilakukan oleh badan penyusun standar akuntansi Indonesia selama ini telah melupakan bahwa akuntansi adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan nasional dan mestinya diderivasi dari tujuan nasional bangsa Indonesia.

Paper ini membahas bagaimana tujuan pelaporan keuangan dalam *conceptual framework* pelaporan keuangan di Indonesia ditetapkan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam ikut mencapai tujuan sosial ekonomi nasional. Apabila salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah mengungkap tanggung jawab sosial perusahaan maka hal itu dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menyusun standar akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Paper ini dimulai dengan pembahasan mengenai arti pentingnya tujuan pelaporan keuangan dalam sebuah *conceptual framework*, kemudian dipaparkan mengenai pokok-pokok tujuan pelaporan keuangan menurut SFAC No.1 dan SAK 1994. Pembahasan selanjutnya adalah mengungkap pertimbangan-pertimbangan yang dipakai oleh FASB dalam menetapkan SFAC No.1, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan terhadap teori-teori yang mendukung pertimbangan aspek sosial ke dalam tujuan pelaporan keuangan. Inti pembahasan dalam paper ini adalah penetapan tujuan pelaporan keuangan versi Indonesia dengan mempertimbangkan tujuan sosial ekonomi nasional, globalisasi perekonomian, dan lingkup tanggung jawab perusahaan di Indonesia. Pada bagian akhir dari paper ini penulis

mengajukan usulan mengenai rumusan tujuan pelaporan keuangan dalam *conceptual framework* pelaporan keuangan di Indonesia.

KEDUDUKAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN DALAM SEBUAH CONCEPTUAL FRAMEWORK

Penyusunan sebuah *conceptual framework* ditujukan untuk menekan sampai tingkat seminimal mungkin terjadinya ketidakkonsistenan dalam penyusunan standar akuntansi. Artinya standar akuntansi yang satu tidak akan bertentangan dengan standar akuntansi yang lain. Dengan adanya suatu *conceptual framework* diharapkan semua standar akuntansi yang diundangkan diderivasi dari konsep yang sama, dengan demikian akan terbentuk standar-standar sebagai satu aturan yang fungsional dan terpadu. Hal ini sesuai dengan fungsi suatu *conceptual framework* seperti diungkapkan oleh Wibisana (1992):

1. Untuk menjadi pedoman bagi badan penyusun standar akuntansi dalam menyusun standar akuntansi,
2. Untuk menghilangkan inkonsistensi dalam penyusunan standar akuntansi,
3. Untuk menjadi pedoman dan acuan dalam mengevaluasi dan menilai praktik akuntansi dan standar yang telah ada,
4. Untuk menghilangkan kontroversi seputar penyusunan prinsip akuntansi.

Conceptual framework akan berlaku cukup permanen dan dalam waktu yang relatif panjang, karenanya harus merupakan pemikiran yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan yang ada, sehingga standar akuntansi yang disusun atas *conceptual framework* tersebut menimbulkan praktik akuntansi yang menjamin tercapainya tujuan pelaporan keuangan yang telah ditetapkan. Penyusunan *conceptual framework* harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi. Menurut Hendriksen (dalam Suwardjono 1990) ada beberapa langkah dan faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan *conceptual framework*:

1. Pernyataan tentang karakteristik lingkungan ekonomi, politik, budaya, dan sosial tempat akuntansi akan diterapkan. Misalnya saja pernyataan tentang sistem ekonomi, iklim usaha, bentuk-bentuk usaha yang umum dan cara pemenuhan modalnya.
2. Pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan.
3. Penetapan kendala-kendala (*constraints*) yang mengarahkan atau mempengaruhi proses penalaran. Misalnya saja, identifikasi dan evaluasi terhadap kebutuhan pemakai akan informasi

keuangan dan kendala-kendala pemakai untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis informasi yang disajikan kepada mereka. Juga identifikasi karakteristik kualitatif informasi keuangan sebagai kendala pemilihan informasi yang dianggap relevan.

4. Identifikasi dan pemilihan informasi apa yang harus disajikan dan simbol atau elemen laporan keuangan apa yang dapat merepresentasikan makna informasi tersebut.
5. Pengembangan dan pendefinisian elemen atau simbol yang menjadi sarana untuk mengkomunikasikan informasi tentang operasi suatu unit usaha dan lingkungannya.
6. Identifikasi dan evaluasi terhadap kendala-kendala mengenai pengukuran, penilaian, dan pengakuan serta pengungkapan informasi ke dalam elemen laporan keuangan.
7. Pengembangan standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran, penilaian, pengakuan dan penyajian elemen laporan keuangan.
8. Perancangbangan (*designing*) struktur dan format sistem informasi (prosedur, metode, dan teknik) untuk mengumpulkan dan mengolah data serta untuk meringkas dan melaporkan informasi yang relevan.
9. Penerapan dalam situasi yang sesungguhnya berdasarkan prosedur dan metode yang dipilih.

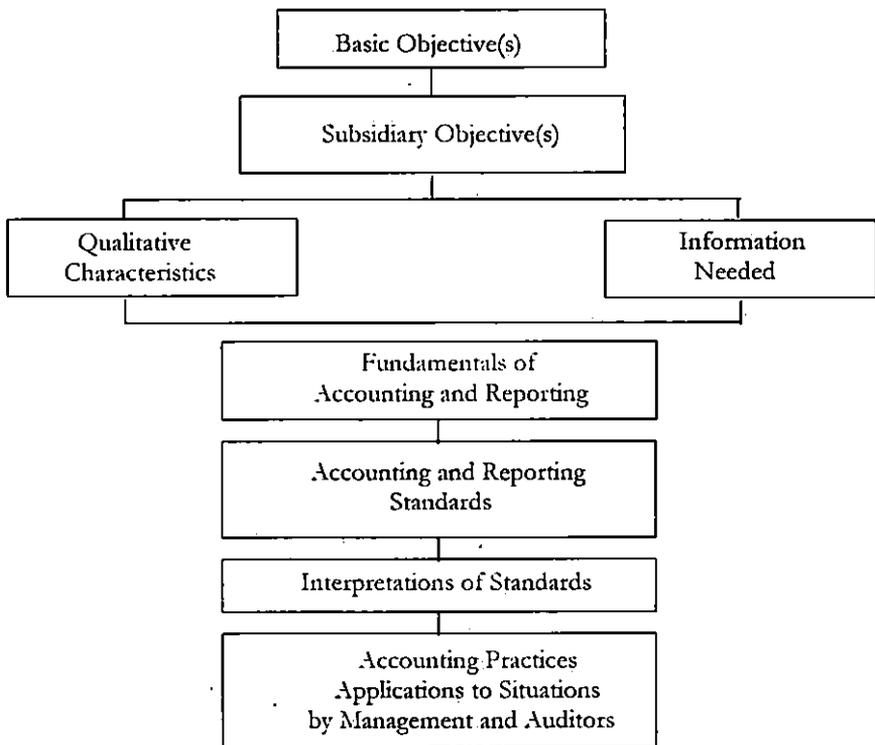
Berdasarkan uraian tersebut, maka suatu kerangka konseptual akan terdiri dari:

1. Pernyataan tentang tujuan-tujuan pelaporan keuangan (*objectives of financial reporting*),
2. Pernyataan tentang identifikasi para pemakai laporan keuangan,
3. Pernyataan tentang kualitas dan keterbatasan laporan keuangan,
4. Aturan-aturan tentang dasar pengukuran, penilaian, pengakuan dan penyajian elemen-elemen laporan keuangan,
5. Definisi-definisi elemen laporan keuangan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas jelaslah bahwa tujuan pelaporan keuangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu kerangka acuan konseptual maupun dalam suatu standar akuntansi. FASB menempatkan tujuan pelaporan keuangan sebagai urutan yang pertama dari *conceptual framework*. Kedudukan tujuan pelaporan keuangan FASB dapat dilihat pada gambar 1. Tujuan pelaporan keuangan yang telah ditetapkan akan mempengaruhi unsur-unsur lain dalam *conceptual framework*. Tujuan pelaporan keuangan juga akan terimplikasi ke dalam standar akuntansi, dan secara tidak

langsung juga akan mempengaruhi praktik akuntansi. Tujuan pelaporan keuangan akan menentukan luas lingkup pelaporan dan pemakai informasi keuangan, dengan demikian juga akan menentukan informasi apa saja yang akan dihasilkan oleh pelaporan keuangan dan siapa saja pihak yang dituju oleh informasi keuangan tersebut.

Setiap unit/pelaku ekonomi mempunyai tanggung jawab terhadap tujuan sosial ekonomi nasional. Jika tanggung jawab sosial ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen, maka alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak eksternal harus pula konsisten dengan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian proses penetapan tujuan pelaporan keuangan harus pula mempertimbangkan tujuan sosial ekonomi.



Gambar 1 : (Hierarki Unsur dalam Rerangka Konseptual FASB*)

*)Sumber: Tuanakota, Theodorus M."Rerangka Konseptual dan Penyusunan Standar Akuntansi," Konvensi Nasional Akuntansi ke-2, Yogya, Des.1992 hal. 2.

Dalam SFAC no. 1, FASB menyatakan bahwa:

The objectives of financial reporting are not immutable. They are affected by the economic, legal, political, and social environment in which financial reporting takes place (FASB 1978, hal.vii).

Selanjutnya dijelaskan:

Accordingly, the objectives in this statement are affected by the economic, legal, political, and social environment in the United States (FASB 1978, para. 9).

Tujuan pelaporan keuangan mempunyai pengertian yang lebih luas dalam menggambarkan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan. Akuntansi merupakan suatu aktivitas menghasilkan jasa (*service activity*) berupa informasi keuangan, sehingga akuntansi sebagai alat akan memenuhi fungsinya dengan baik kalau jasa yang dihasilkan benar-benar merupakan jasa yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan tersebut. Akuntansi akan bermanfaat kalau dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan variabel-variabel ekonomi dan sosial dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu (Suwardjono 1989, hal. 3). Oleh karena itu perlu diidentifikasi variabel-variabel lingkungan seperti informasi tentang apa, siapa yang memerlukan informasi dan untuk pengambilan keputusan apa informasi tersebut diperlukan. Setelah variabel-variabel tersebut dapat diidentifikasi maka dapat ditentukan tujuan pelaporan keuangan yang ingin dicapai yang menjadi pengaruh dalam proses pemikiran dan pemilihan konsep-konsep yang relevan dengan tujuan tersebut. Tujuan yang berbeda tentu saja akan menghasilkan praktik akuntansi yang berbeda pula.

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN (SFAC NO. 1 DAN SAK 1994)

Tujuan Pelaporan Keuangan dalam SFAC No 1

Dalam paragraf ke-28 SFAC No. 1, dijelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan diderivasikan dari kebutuhan informasi para pemakai eksternal yang tidak mempunyai otoritas untuk menyusun informasi keuangan yang diinginkan mengenai suatu perusahaan. Para pemakai informasi tersebut harus menggunakan informasi yang disediakan oleh manajemen sebagai sarana untuk berkomunikasi antara pihak pemakai eksternal dan pihak perusahaan. Walaupun laporan keuangan mempunyai aspek internal dan eksternal, FASB lebih memfokuskan kepada aspek eksternalnya. Aspek eksternal yang dituju

oleh informasi keuangan adalah pihak investor dan kreditor, yang merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Dalam uraian berikut ini akan dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan secara umum berdasarkan manfaat informasi keuangan.

1. Informasi yang Berguna dalam Pengambilan Keputusan Kredit dan Investasi

Dalam paragraf ke-34 SFAC No.1, FASB menetapkan tujuan pelaporan keuangan sehubungan dengan fungsi informasi keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit.

Financial reporting should provide information that is useful to present and potential investors and creditors and other users in making rational investment, credit, and similar decisions. The information should be comprehensible to those who have a reasonable understanding of business and economic activities and are willing to study the information with reasonable diligence (FASB 1978, para.34).

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor (sekarang maupun potensial) dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan keputusan lainnya secara rasional. Jelaslah bahwa fokus informasi keuangan menurut tujuan di atas adalah pihak investor dan kreditor. Investor sebagai pihak penyandang dana suatu perusahaan memerlukan informasi keuangan yang akan membantu dalam pengambilan keputusan investasi, misalnya apakah investor akan tetap menanamkan dananya pada perusahaan tersebut atau akan memindahkan ke investasi lain. Bagi calon investor tentu juga ingin mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, tingkat pengembalian investasi, dan prospek mendatang perusahaan. Bagi para kreditor sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau tidak kredit kepada suatu perusahaan tentu juga perlu mempertimbangkan mengenai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan kreditnya jika telah jatuh tempo.

Investor dan kreditor yang dimaksud oleh FASB tersebut bukanlah dalam arti yang sempit, tetapi meliputi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam transaksi investasi dan kredit, dan juga pihak-pihak yang menjadi perantara transaksi tersebut. Berdasarkan paragraf ke-35 pihak investor dan kreditor terdiri dari:

1. Pihak yang membeli sekuritas dari investor atau kreditor lain serta pihak yang membeli sekuritas baru langsung dari perusahaan atau melalui penjamin (*underwriter*).

2. Pihak yang menanamkan dananya dalam jangka waktu yang lama serta pihak yang sering memperjualbelikannya.
3. Pihak yang menginginkan keselamatan investasinya maupun pihak yang lebih suka menanggung risiko untuk memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi.
4. Individu maupun institusi.

Kelompok utama pihak investor adalah pemegang sekuritas kepemilikan (*equity securityholders*) dan pemegang sekuritas pinjaman (*debt securityholders*). Pihak kreditor adalah pemasok benda atau jasa yang menjual secara kredit kepada perusahaan, pelanggan dan karyawan yang mempunyai klaim, institusi yang memberi pinjaman, individu yang memberi pinjaman dan pemilik sekuritas pinjaman (*debt securityholders*). Istilah investor dan kreditor juga meliputi pihak analis dan advisor sekuritas, broker, ahli hukum, pemerintah (dalam hal ini SEC/badan koordinasi pasar modal) dan pihak lain yang memberi nasehat atau sebagai wakil bagi kepentingan investor dan kreditor.

Sehubungan dengan manfaat informasi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit, FASB mensyaratkan bahwa laporan keuangan harus mampu menjadi informasi yang mudah untuk dipahami bagi pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi, dan yang ingin mempelajari informasi dengan kemauan yang memadai. Hal ini dimaksudkan agar informasi keuangan dapat membantu pihak nonprofesional maupun pihak yang profesional dalam pengambilan keputusan, terutama pihak yang berkepentingan untuk mempelajari bagaimana menggunakan alat bantu informasi tersebut secara tepat.

2. Informasi yang Berguna untuk Mengevaluasi Prospek Aliran Kas

Prospek penerimaan kas di masa mendatang dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk memperoleh kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo, dan untuk memenuhi operasi lain yang memerlukan kas. Kas juga digunakan untuk melakukan reinvestasi dan untuk membayar dividen. Prospek penerimaan kas akan berpengaruh terhadap persepsi investor dan kreditor terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal.

Sehubungan dengan informasi mengenai aliran kas perusahaan, FASB menetapkan tujuan pelaporan keuangan seperti berikut:

Financial reporting should provide information to help present and potential investors and creditors and other users in assessing the amounts, timing, and uncertainty of prospective cash receipts from

dividends or interest and the proceeds from the sale redemption, or maturity of securities or loans (FASB 1978, para.37)

Berdasarkan tujuan di atas, maka palaporan keuangan oleh suatu perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang bermanfaat untuk membantu investor dan kreditor (sekarang maupun potensial) dan pemakai lain dalam usaha untuk mengetahui mengenai jumlah, saat dan ketidakpastian prospek penerimaan kas di masa mendatang, yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan penjualan, atau pelunasan sekuritas atau pinjaman.

2. Informasi mengenai Sumber-Sumber Ekonomi Perusahaan, Klaim terhadap Sumber-Sumber tersebut, dan Prubahannya

Dalam tujuan pelaporan keuangan yang ke-3 ini FASB membagi tujuan tersebut ke dalam lima buah sub tujuan. Tujuan intinya adalah bahwa laporan keuangan harus mampu menyediakan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan efek transaksi, kejadian dan keadaan yang menyebabkan perubahan sumber-sumber tersebut dan klaim terhadapnya. Klaim terhadap sumber-sumber ekonomi perusahaan merupakan kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber yang dimiliki dan dikuasai kepada perusahaan/pihak lain dan kepada pemilik modal.

Financial reporting should provide information about the economic resources of an enterprise, the claims to those resources (obligations of the enterprise to transfer resources to other entities and owners equity), and the effects of transactions, events, and circumstances that change resources and claims to those resources (FASB 1978, para.40).

Tujuan tersebut dirinci lagi menjadi lima sub tujuan yang masing-masing adalah informasi yang berhubungan dengan:

1. Sumber-sumber ekonomi, kewajiban, dan modal pemilik,
2. Kinerja dan laba perusahaan,
3. Likuiditas, solvabilitas dan aliran dana,
4. Pertanggungjawaban dan kinerja manajemen,
5. Penjelasan dan interpretasi manajemen.

Tujuan Pelaporan Keuangan dalam SAK 1994

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat dalam buku Standar Akuntansi Keuangan 1994

menyatakan tujuan pelaporan keuangan dengan kata “Tujuan Laporan Keuangan”. Tujuan tersebut dinyatakan dalam paragraf ke-12,13,14 seperti berikut ini:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian, agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Dalam tujuan pertama tersebut *stakeholders* yang memanfaatkan informasi akuntansi hanya terbatas untuk pengambilan keputusan ekonomi. Informasi akuntansi yang disediakan juga terbatas pada informasi posisi keuangan (neraca), kinerja perusahaan (laporan laba/rugi), dan perubahan posisi keuangan. Pada tujuan kedua, informasi akuntansi hanya membatasi informasi keuangan saja serta elemen-elemen laporan keuangannya juga terbatas pada informasi yang terdapat dalam tujuan pertama. Tujuan ketiga merupakan tujuan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak luar tentang apa yang telah dilakukan oleh manajemen terhadap sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Sekali lagi hanya tanggung jawab ekonomi yang dituju oleh informasi akuntansi, karena tanggung jawab non keuangan tidak tercakup dalam informasi yang dihasilkan oleh informasi akuntansi versi tujuan laporan keuangan dalam SAK 94.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat dalam buku Standar Akuntansi Keuangan 1994 jika disetarakan dengan sebuah kerangka acuan konseptual pelaporan keuangan (*conceptual framework for financial reporting*) maka terdapat suatu kekurangan yang sangat besar. Konsep dalam SAK tersebut tidak diawali dengan

gambaran tentang faktor-faktor yang mendasari terbentuknya konsep-konsep termasuk di dalamnya adalah tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Padahal sebelum tujuan pelaporan keuangan ditetapkan harus ada pernyataan tentang karakteristik lingkungan ekonomi, politik, budaya dan sosial tempat akuntansi akan diterapkan. Itu berarti tujuan pelaporan keuangan harus diderivasi dari tujuan sosial ekonomi setempat.

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DALAM PENETAPAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Penetapan Tujuan Pelaporan Keuangan oleh FASB (SFAC No.1)

Tujuan pelaporan keuangan menurut SFAC No.1 ditetapkan setelah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi di Amerika Serikat, sehingga tujuan sosial ekonomi bisa tercermin dalam tujuan pelaporan keuangan tersebut. Tujuan sosial ekonomi suatu negara mempunyai kaitan yang sangat erat dengan aktivitas setiap pelaku ekonomi, karena setiap pelaku ekonomi mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut serta mencapai apa yang menjadi tujuan sosial ekonomi nasional. Di samping itu tujuan sosial ekonomi nasional juga identik dengan sistem perekonomian yang dianut oleh negara bersangkutan, karena mekanisme perekonomian menunjukkan prioritas distribusi kemakmuran dan kesejahteraan.

Mekanisme perekonomian yang dianut oleh Amerika Serikat adalah mekanisme pasar. Jumlah, harga, dan jenis komoditi barang atau jasa yang diproduksi sangat ditentukan oleh situasi di pasar. Perekonomian pasar dan pengakuan penuh terhadap kepemilikan pribadi mempunyai konsekuensi bahwa pemerintah tidak dapat secara langsung mengendalikan alokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Masyarakat sendiri yang akan melakukan alokasi sumber daya ekonomi melalui mekanisme pasar, termasuk di dalamnya pasar modal. Dengan demikian maka investor dan kreditor menjadi fokus atau pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan. Tentu saja pihak lain tidak diabaikan dan dianggap dapat menjadi penumpang manfaat informasi yang ditujukan kepada investor dan kreditor.

Dalam paragraf ke-10' sampai ke-16 SFAC No.1 disebutkan beberapa pertimbangan dalam penetapan tujuan pelaporan keuangan. Pertimbangan tersebut merupakan gambaran ringkas mengenai situasi sosial ekonomi di Amerika Serikat yang mempengaruhi penetapan tujuan pelaporan keuangan, yaitu seperti berikut:

1. Perkembangan perekonomian yang sangat tinggi (para.10).
2. Produksi dan pemasaran benda dan jasa melibatkan proses yang panjang, terus menerus dan rumit, sehingga membutuhkan modal yang cukup banyak (para.11).

3. Hampir seluruh aktivitas produktif di Amerika Serikat dilaksanakan melalui investor sebagai pemilik perusahaan, termasuk sejumlah perusahaan yang membeli, menjual dan memperoleh pendanaan dalam pasar nasional atau multinasional (para.12).
4. Perusahaan memperoleh modal untuk aktivitas produksi dan pemasaran tidak hanya dari institusi keuangan (misalnya bank) dan kelompok kecil atau individu-individu, tetapi juga dari masyarakat luas melalui penerbitan saham (*equity*) atau surat hutang (*debt securities*) yang diedarkan di pasar modal yang tumbuh dan berkembang pesat (para.13).
5. Sumber-sumber produktif pada umumnya dikuasai oleh pihak swasta (para.14).
6. Pihak pemerintah merupakan pihak utama dalam penyediaan data statistik perekonomian dan informasi ekonomi lainnya yang banyak digunakan oleh manajer, investor, dan pemakai lain dalam suatu perusahaan individual dan pada umumnya meliputi laporan-laporan atau statistik lain serta analisis yang sangat mempengaruhi persepsi mengenai masalah bisnis dan ekonomi (para.15).
7. Efektivitas individu, perusahaan, pasar dan pemerintah dalam pengalokasian sumber-sumber yang terbatas sangat tergantung kepada informasi yang merefleksikan posisi dan prestasi perusahaan untuk membantu dalam pengevaluasian alternatif tindakan dan memperkirakan kembalian (*return*), biaya, dan risiko. Dalam hal ini fungsi pelaporan keuangan adalah sebagai alat bantu pengambilan keputusan ekonomi mengenai suatu perusahaan dan investasi serta kredit terhadap perusahaan tersebut (para.16).

Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertulis dalam paragraf hke-10 sampai ke16 (SFAC No.1) dijadikan dasar oleh FASB untuk menetapkan mengenai siapa pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak yang berkepentingan terhadap unit usaha dan pelaporan keuangannya. Pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan menunjukkan kepada siapa saja pengelola perusahaan harus mempertanggungjawabkan aktivitas perusahaan. Investor dan kreditor adalah fokus yang dituju oleh pelaporan keuangan, namun demikian dalam SFAC No.1 juga disebutkan adanya *potential users* (pemakai potensial), yang meliputi berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung juga mempunyai kepentingan dengan pelaporan keuangan. Dengan demikian maka tujuan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh FASB tidak bersifat sempit, karena bukan hanya investor dan kreditor semata yang dituju oleh pelaporan keuangan. Pihak "potential users" menyebabkan lingkup pelaporan keuangan/ akuntansi menjadi

lebih luas, karena informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan dituntut untuk tidak hanya mengungkap tanggung jawab manajemen kepada investor dan kreditor, tetapi juga memungkinkan untuk melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas.

Amerika Serikat adalah tempat lahirnya sistem perekonomian mekanisme pasar. Sejak pemikiran mekanisme perekonomian pasar lahir (oleh Adam Smith/aliran klasik) sampai memasuki abad ke-21 sekarang ini, telah terbukti bahwa mekanisme perekonomian pasar mampu menopang Amerika Serikat sebagai negara yang kuat dan relatif stabil perekonomiannya. Pada abad ke-21 ini hampir tidak ada lagi negara yang menerapkan mekanisme perekonomian terpusat. Hal ini dibuktikan dengan hancurnya Uni Soviet, bersatunya Jerman Timur ke Jerman Barat dan mulai terbukanya RRC bagi perdagangan luar negeri. Mekanisme perekonomian terpusat yang pada mulanya dianggap dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata, ternyata justru melahirkan ketidakefisienan dan penderitaan para pelaku ekonominya. Ramalan Karl Marx akan hancurnya negara kapitalis dan akan jayanya negara komunis ternyata tidak terbukti, yang terjadi justru sebaliknya.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan setiap negara. Amerika Serikat sebagai negara yang menerapkan mekanisme perekonomian pasar tidak meninggalkan aspek kesejahteraan sosial ini. Perlindungan terhadap kaum minoritas, kesejahteraan buruh dan karyawan, pajak pengangguran untuk pemberian tunjangan sosial (*lavy tax*), dan undang-undang anti trust merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Aspek sosial tersebut menjadi tanggung jawab setiap pelaku ekonomi, sehingga setiap perusahaan harus memperhatikan aspek kesejahteraan sosial ini di samping harus mencapai tujuan perusahaan.

Pertimbangan Aspek Sosial ke dalam Tujuan Pelaporan Keuangan

Penetapan tujuan pelaporan keuangan dalam suatu proses perikayasaan akuntansi harus memperhatikan apa yang menjadi tujuan sosial ekonomi negara tempat akuntansi akan diterapkan. Ketidakkonsistenan antara tujuan pelaporan keuangan dengan tujuan sosial ekonomi akan menyebabkan kekacauan dalam praktik akuntansi, yaitu arah yang tidak jelas dari akuntansi itu sendiri. Kekacauan ini akan terlihat jelas jika akuntansi tidak lagi mampu menjadi alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Jika pihak luar perusahaan yang merasa mempunyai kepentingan terhadap aktivitas perusahaan tidak lagi puas dengan pertanggungjawaban manajemen melalui media laporan keuangan, maka kepercayaan masyarakat terhadap akuntansi akan berkurang. Contohnya adalah mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang

belum lazim diungkap melalui media akuntansi, karena tujuan pelaporan keuangan yang tidak mencakup kepentingan ini.

Setiap unit/pelaku ekonomi mempunyai tanggung jawab terhadap tujuan sosial ekonomi nasional. Jika tanggung jawab sosial ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen, maka alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak eksternal harus pula konsisten dengan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian proses penetapan tujuan pelaporan keuangan harus pula mempertimbangkan tujuan sosial ekonomi.

Aspek sosial tersebut juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan praktek akuntansi, karena tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sisi pertanggungjawaban manajemen kepada pihak eksternal. Hal ini melahirkan cabang baru yang disebut dengan akuntansi sosial yang akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan. FASB menyatakan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya terdiri dari laporan-laporan keuangan (neraca, rugi-laba, dan perubahan posisi keuangan), tetapi juga informasi-informasi yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi.

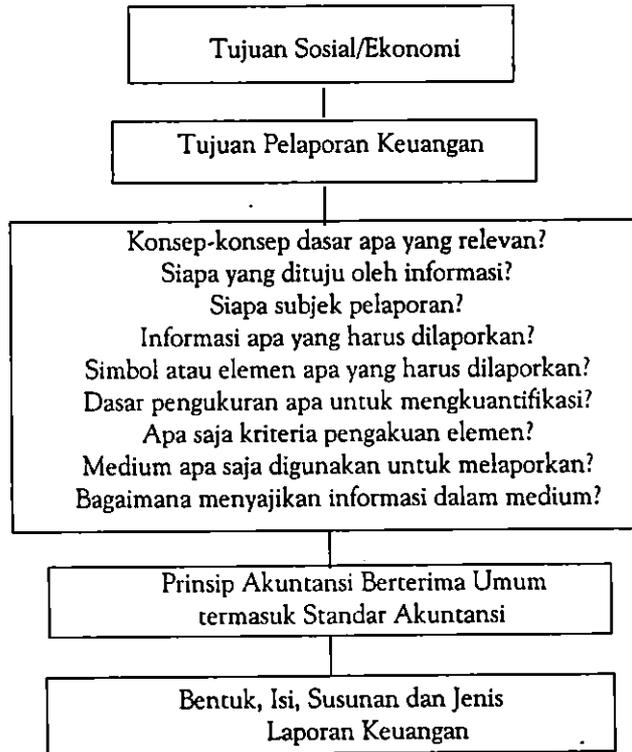
Financial reporting includes not only financial statements, but also other means of communicating information that relates, direct or indirectly, to the information provided by the accounting system. News releases, management's forecasts or other descriptions of its plans or expectations, and descriptions of an enterprise's social or environmental impact are examples of reports giving financial information other than financial statements (FASB 1978, para.7).

Pertimbangan aspek sosial ke dalam akuntansi juga dilakukan oleh Trueblood Commite. Trueblood Commite Report yang diterbitkan oleh AICPA pada tahun 1973 mengajukan 12 tujuan laporan keuangan. Tanggung jawab sosial perusahaan tercakup dalam tujuan yang ke-12 berikut:

An objective of financial statements is to report on these activities of the enterprise affecting society which can be determined and described or measured and which are important to the role of enterprises in its social environment (Most dan Winters 1977, hal. 71).

"The (FASB's) objectives must be responsive to many more considerations than accounting theory or our notions of economically useful data... Corporate reporting standards should result in data that are useful for economic decisions provided that the standard is consistent with the

national macro economic objectives and the economic programs designed to reach these goals."



Gambar 2: (Proses Perekayasa Akuntansi*)

*)Sumber: Suwardjono, "Perekayasa Informasi Akuntansi untuk Alokasi Sumber Daya Ekonomi Secara Efisien Melalui Pasar Modal," Majalah Akuntansi, No. 12, Desember 1990, hal. 27.

Menurut Profesor David M. Hawkins, harus ada hubungan yang erat antara tujuan pelaporan keuangan dengan tujuan perekonomian nasional. Dia mengatakan sebagai berikut (dalam Solomons 1978, hal 67):

"The (FASB's) objectives must be responsive to many more considerations than accounting theory or our notions of economically useful data... Corporate reporting standards should result in data that are useful for economic decisions provided that the standard is consistent with the national macro economic objectives and the economic programs designed to reach these goals."

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pelaporan keuangan mempunyai hubungan yang erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan, lebih luas lagi dengan tujuan sosial ekonomi negara (lihat gambar 2). Dalam gambar 2 tersebut digambarkan mengenai suatu proses perekayasaan akuntansi, yang menunjukkan tujuan pelaporan keuangan diderivasikan dari tujuan sosial ekonomi negara tempat akuntansi akan diterapkan. Akuntansi sebagai media/alat pertanggungjawaban manajemen tidak akan relevan lagi jika hanya menyangkut hubungan antara perusahaan dengan investor dan kreditor saja, karena tanggung jawab suatu perusahaan juga meliputi tanggung jawab sosial.

Aktivitas perusahaan tidak hanya menghasilkan laba atau menaikkan harga saham/ekuitas di pasar modal saja. Aktivitas perusahaan juga menimbulkan penyakit sosial seperti kerusakan ekosistem, polusi, kriminal, monopoli, keterbelakangan desa, meningkatnya utang nasional, diskriminasi dan lain-lain. Dalam hal ini akuntansi konvensional dituntut untuk lebih reaktif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Paradigma-paradigma berikut ini merupakan kecenderungan perubahan sikap dari orientasi laba menuju orientasi sosial (Harahap 1987, hal. 49):

1. Kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial.

Sejarah menunjukkan bahwa kalangsungan hidup manusia dan kesejahteraan murni masyarakat hanya dapat lahir dari sikap kerja sama antar unit-unit masyarakat itu sendiri. Negara tidak dapat hidup sendiri tanpa partisipasi rakyatnya. Perusahaan juga tidak akan maju tanpa dukungan langganannya maupun lingkungan sosialnya. Kenyataan ini semakin disadari dan semakin dibutuhkan penerapannya.

2. Kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan.

Kesadaran terhadap kualitas lingkungan telah mengubah paradigma dari "*The human exceptionalism paradigm*" menuju "*The new environment paradigm*". Paradigma yang pertama menganggap bahwa manusia adalah makhluk unik di bumi yang memiliki kebudayaan sendiri yang tidak dapat dibatasi oleh kepentingan makhluk lain. Sebaliknya paradigma yang kedua menganggap bahwa manusia adalah makhluk di antara bermacam-macam makhluk yang mendiami bumi yang saling mempunyai keterkaitan dan sebab akibat dan dibatasi oleh sifat keterbatasan dunia itu sendiri, baik sosial, ekonomi, atau politik. Sekarang manusia semakin menyadari bahwa paradigma yang kedua adalah yang benar dan yang menjadi pedoman, sehingga perhatian kepada lingkungan semakin besar.

3. *Ecosystem perspective*.

Orientasi yang terlalu diarahkan kepada pembangunan ekonomi, efisiensi, *profit maximization* menimbulkan krisis ekosistem. Gejala ini

menaruh perhatian para ahli sehingga muncul kelompok-kelompok tingkat dunia yang berorientasi terhadap keselamatan lingkungan.

4. Ekonomisme vs sosialisme.

Ekonomisme mengarahkan perhatiannya hanya kepada kepuasan individual sebagai suatu unit yang selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebaliknya sosialisme memfokuskan perhatian terhadap kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan efek sosial yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Walaupun sosialisme ini belum tampak nyata, namun pengaruh pemerintah dan tekanan sosial cenderung menguntungkan kepentingan sosial.

Paradigma-paradigma di atas menunjukkan semakin kuatnya pengaruh isu-isu sosial terhadap pertanggungjawaban suatu perusahaan. Isu-isu sosial yang timbul, misalnya mengenai kesejahteraan karyawan dan pencemaran lingkungan oleh suatu perusahaan memperkuat bahwa tanggung jawab pengelolaan suatu perusahaan tidak hanya terbatas pada kepentingan investor dan kreditor. Dampak sosial akibat aktivitas perusahaan juga merupakan satu sisi tanggung jawab pihak manajemen kepada pihak luar.

Perubahan Struktur Sosial pada Lingkungan Makro

Transformasi fungsi produksi telah melalui tiga tahap, yaitu dari $Q = F(L)$ ke $Q = F(L,K)$ dan seterusnya ke $Q = F(L,K,N)$ (Sudibyo 1992, hal. 18). Fungsi tahap pertama menunjukkan bahwa produksi hanya tergantung kepada tenaga kerja kasar (L), tahap kedua menunjukkan adanya peranan modal (K) dalam proses produksi, dan tahap ketiga produksi dipengaruhi oleh L, K, dan teknologi (N). Peranan teknologi ini justru mendominasi aktivitas produksi pada tahap moderen. Transformasi fungsi produksi tersebut tidak hanya memberi dampak besar terhadap struktur ekonomi makro, tetapi juga terhadap struktur sosial makro. Semakin kuatnya dominasi kedudukan sumber daya modal (K) dan teknologi (N) dalam proses produktif perusahaan, tentu akan dibarengi dengan semakin strategisnya kedudukan politis pemasok kedua sumber daya itu dalam perusahaan. Para pemasok sumber daya K dan N, dalam literatur sosiologi secara kolektif sering disebut kelas menengah (Sudibyo 1992, hal. 18). Besarnya kelas menengah dalam masyarakat sangat tergantung pada tingkat industrialisasi. Semakin tinggi tingkat industrialisasi, berarti semakin besar pangsa peran sektor moderen dalam perekonomian makro. Kelas menengah dalam masyarakat dikenal dengan aspirasinya yang tinggi terhadap demokrasi, keterbukaan, persamaan hak, hak asasi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu semakin industrialisasi di Indonesia ini berhasil, semakin aspirasi mengenai masalah-masalah tersebut mencuat ke permukaan. Ada satu hal

yang perlu dicatat dengan adanya perubahan struktur sosial pada lingkungan makro, yaitu dengan semakin besarnya kelas menengah dalam masyarakat, maka tuntutan akan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin besar dan vokal. Perusahaan memerlukan suatu alat yang bisa menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan tersebut merupakan suatu bisnis yang cukup peduli dan bertanggung jawab secara sosial (*socially concerned and responsible*). Tujuan pelaporan keuangan yang terlalu sempit, yang hanya berorientasi pada kepentingan investor dan kreditor tidak akan lagi mampu menghasilkan alat pertanggungjawaban satuan usaha secara lengkap. Oleh karena itu perlu adanya perluasan terhadap tujuan pelaporan keuangan konvensional untuk membuka peluang terbentuknya suatu alat, yang mampu mengisi kebutuhan dalam mengungkap tanggung jawab perusahaan secara lengkap, termasuk di dalamnya tanggung jawab sosial.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya informasi akuntansi tidak hanya bermanfaat dalam pengendalian sumber daya ekonomi, tetapi juga bermanfaat dalam pengendalian alokasi kemakmuran masyarakat sebagai tujuan sosial ekonomi suatu negara. Badan usaha yang besar cenderung untuk mempengaruhi kehidupan perekonomian dan masyarakat luas, sehingga badan usaha tidak hanya bertanggung jawab kepada investor dan kreditor, tetapi bertanggung jawab pula kepada masyarakat yang lebih luas (*public/social responsibility*). Pihak-pihak seperti pemerintah, pemasok, calon investor dan kreditor, karyawan, pelanggan, analis keuangan, broker dan penjamin di pasar modal, ahli hukum, ahli ekonomi, otoritas perpajakan, organisasi buruh, asosiasi dagang, dan masyarakat luas adalah pihak-pihak yang juga berkepentingan terhadap suatu unit usaha dan akan mengambil keputusan ekonomi.

PENETAPAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN VERSI INDONESIA

Pertimbangan Tujuan Sosial Ekonomi Nasional

Sistem perekonomian yang berbeda akan menyebabkan tujuan kegiatan para pelaku ekonomi (unit usaha) juga berbeda, demikian pula pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelaku ekonomi akan memiliki prioritas kepentingan yang berbeda. Jika tujuan pelaporan keuangan ditetapkan berdasarkan tujuan sosial ekonomi yang berbeda, tentu saja akan menghasilkan konsep tujuan yang berbeda pula, walaupun sangat mungkin ada kesamaan konsep tertentu. Tujuan pelaporan keuangan hendaknya berorientasi kepada tujuan sosial ekonomi serta sistem tata nilai sosial yang hidup dalam lingkungan yang bersangkutan.

Jika tujuan pelaporan keuangan Indonesia dipaksakan sama dengan tujuan pelaporan keuangan di Amerika Serikat, maka akan menyebabkan akuntansi kehilangan fungsinya sebagai alat kendali para

pelaku ekonomi dalam beraktivitas untuk mencapai tujuan sosial ekonomi nasional. Tujuan pelaporan keuangan di Indonesia yang berlaku sejak PAI 1984 sampai dengan SAK 1994 menimbulkan suatu kesan bahwa PAI 1984 dan SAK 1994 disusun untuk sekadar membenahi pembukuan perusahaan-perusahaan, tetapi belum mengarah ke penciptaan informasi untuk pengendalian sosial/ekonomi yang spesifik di Indonesia. Tujuan tersebut tidak secara tegas menunjuk siapa fokus yang dituju oleh informasi keuangan, serta latar belakang yang mendasari tujuan belum diuraikan secara tegas, sehingga belum dapat digambarkan arah yang ingin dicapai oleh akuntansi di Indonesia.

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1-3 ditegaskan bahwa dasar mekanisme perekonomian Indonesia adalah asas kekeluargaan. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa penguasaan sumber-sumber ekonomi lebih besar ada pada negara daripada penguasaan oleh individu/swasta. Tujuan aktivitas dalam bidang perekonomian adalah untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran individu/kelompok.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat 1 pasal 33 UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa dasar perekonomian Indonesia adalah asas kekeluargaan, yang merupakan dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat 2 pasal 33 UUD 1945 merupakan konsekuensi tujuan demokrasi ekonomi. Dalam sistem demokrasi ekonomi, yang menjadi tujuan adalah kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan individu/orang-seorang.

Ayat 3 pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa penggunaan sumber-sumber ekonomi termasuk di dalamnya sumber-sumber alam harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran

rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam sistem perekonomian yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi terdapat tiga bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi utama, yaitu usaha negara, koperasi, dan usaha swasta. Ketiganya harus saling berinteraksi dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Interaksi ini pada dasarnya bertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali. Mekanisme pasar dapat menjamin tercapainya efisiensi penggunaan sumber dana masyarakat serta mendorong dilakukannya investasi di bidang-bidang usaha, dan Indonesia memiliki keunggulan komparatif, sehingga produk Indonesia dapat bersaing dengan hasil produksi negara-negara lain. Melalui proses persaingan yang sehat, mekanisme pasar juga mendorong industri untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi yang paling tepat untuk melaksanakan usahanya.

Selain ketiga bentuk usaha, usaha negara, koperasi dan swasta, harus diperhatikan pula adanya lembaga-lembaga ekonomi lain dalam masyarakat misalnya konsumen, rumah tangga, dan serikat pekerja. Konsumen merupakan salah satu lembaga ekonomi yang sangat penting. Produsen dan pemerintah harus memberikan perhatian pada kepentingan konsumen dalam proses ekonomi, baik dengan mengusahakan lancarnya mekanisme permintaan dan penawaran maupun dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang khusus untuk melindungi konsumen. Serikat pekerja atau organisasi buruh merupakan wadah penting bagi para pekerja sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Serikat pekerja yang mewakili para pekerja, bersama pengusaha harus memperhatikan nasib dan meningkatkan kualitas pekerja, serta mengusahakan agar pekerja memiliki kesadaran dalam turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan.

Sistem demokrasi ekonomi yang dianut di Indonesia tidak menutup kemungkinan diterapkannya sistem mekanisme pasar, sesuai dengan tuntutan globalisasi perekonomian. Tetapi harus diingat bahwa pada kenyataannya mekanisme pasar tidak selamanya dapat berjalan dengan sempurna. Hal ini disebabkan karena para pelaku ekonomi yang tidak seimbang kekuatannya maupun karena para pelaku ekonomi melakukan persaingan dengan cara-cara yang tidak sehat. Dalam demokrasi ekonomi juga dikehendaki adanya kebebasan permintaan dan penawaran yang tidak bertentangan dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam perekonomian. Kebebasan permintaan dan penawaran tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang lebih tinggi, seperti nilai-nilai kesucilaan dan kepentingan pertahanan keamanan serta ketertiban umum masyarakat (ISEI 1990, hal. 5). Peranan pemerintah di samping menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, apabila diperlukan wajib melakukan campur tangan di dalam mekanisme pasar sampai

batas-batas tertentu. Pemerintah juga wajib mencegah penguasaan pasar oleh orang-seorang atau kelompok dan monopoli yang merugikan masyarakat, dan sebaliknya wajib mengusahakan agar semua satuan usaha mempunyai kesempatan berusaha yang sama.

Dari uraian mengenai gambaran ringkas sistem perekonomian Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sistem perekonomian Indonesia secara normatif adalah sebagai berikut:

1. Dasar sistem perekonomian Indonesia adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia mendasari lahirnya sistem demokrasi ekonomi, yang sebenarnya merupakan mekanisme campuran antara mekanisme pasar dan mekanisme pusat. Ciri khususnya adalah imbalan antara pengendalian ekonomi oleh pemerintah dan pengendalian pasar.
2. Pengakuan kepemilikan pribadi yang terbatas. Sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat yang harus dikuasai oleh negara.
3. Swasta, pemerintah (BUMN), dan koperasi adalah sebagai pelaku ekonomi yang utama.
4. Setiap pelaku ekonomi (termasuk di dalamnya *business enterprises*) dituntut untuk ikut serta mewujudkan tanggung jawab sosialnya dalam mencapai kemakmuran bersama, di samping usahanya untuk memperoleh tujuan perusahaan secara individual (misalnya laba).

Pertimbangan Globalisasi Perekonomian

Pada akhir abad ke-21 sejarah dunia memasuki era baru. Dengan bubarnya Uni Soviet dan runtuhnya pemerintahan komunis di beberapa negara Eropa Timur maka peta dunia telah berubah, perang dingin telah berakhir. Sejarah perekonomian dunia beberapa tahun sebelumnya telah mendahului sejarah politik, dengan memasuki era baru, yaitu era globalisasi.

Globalisasi perekonomian akan membawa dampak yang kuat terhadap sistem perekonomian di setiap negara. Penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan sesuai dengan tuntutan internasional, jika tidak maka suatu negara akan tertinggal perekonomiannya. Globalisasi perekonomian juga akan membawa pengaruh ke dalam sistem hukum dan bahkan sistem politik suatu negara. Intimidasi politik sering dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tekanan ekonomi terhadap suatu negara, misalnya masalah

hak asasi kemanusiaan. Hal tersebut sering dilakukan oleh negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti Amerika Serikat. Isu-isu kesejahteraan sosial dan lingkungan sering menjadi isu global, bukan lagi sekadar masalah nasional.

Gejala utama globalisasi perekonomian adalah mengalirnya arus dana yang melintasi batas negara secara deras, baik melalui lembaga keuangan (bank dan asuransi), pasar modal, maupun secara langsung dengan ekspansinya perusahaan multinasional. Gejala lain yang tidak kurang pentingnya adalah mata uang bukan lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi merupakan komoditi yang diperdagangkan, dan bahkan menjadi obyek spekulasi.

Globalisasi perekonomian juga akan memperluas lingkup tanggung jawab setiap pelaku ekonomi, yang berarti akan mempengaruhi pelaporan keuangannya. Globalisasi perekonomian mempunyai dampak bahwa pelaporan keuangan harus memperhatikan kebutuhan informasi para pemakai yang berskala internasional, yang terdiri dari:

1. Lembaga keuangan.

Dengan terbuka bebasnya lalu lintas kredit antar negara, maka bila suatu perusahaan di Indonesia ingin memperoleh kredit dari bank di luar negeri, maka laporan keuangan perusahaan tersebut tentu saja harus dapat dibaca dan dipahami oleh analis dan staf bank asing tersebut.

2. Investor dan calon investor asing.

Investor dan calon investor asing tentu berkepentingan atas laporan keuangan emiten, dan diharapkan dapat memahaminya secara tidak menyesatkan.

3. Pialang internasional.

Pialang yang beroperasi secara internasional perlu melakukan analisis atas laporan keuangan emiten untuk kepentingan pelanggannya. Untuk dapat memberikan saran yang tepat, pialang internasional bukan saja harus dapat mengerti laporan keuangan emiten, tetapi juga harus dapat membandingkannya secara obyektif.

4. Badan pengelola dan badan pengawas pasar modal.

Bila emiten ingin terdaftar di bursa sekuritas luar negeri agar saham atau obligasinya dapat diperdagangkan di sana, maka laporan keuangannya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh badan otoritas di negara yang bersangkutan. Misalnya SEC di Amerika Serikat mewajibkan semua emiten harus menyusun laporan keuangan berdasarkan GAAP yang berlaku di Amerika Serikat, atau menyajikan *audited footnotes* yang menjelaskan rekonsiliasi perbedaan standar akuntansi yang dianut dengan GAAP Amerika Serikat.

5. Perusahaan multinasional.

Perusahaan multinasional yang mempunyai usaha dan anak perusahaan di luar negeri perlu memahami standar akuntansi yang berlaku di negara anak perusahaannya, dan perlu menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Lingkup Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia

Dalam penetapan tujuan pelaporan keuangan harus dilihat mengenai siapa pihak yang dituju oleh informasi, dan informasi apa yang bermanfaat bagi pihak yang dituju informasi tersebut. Jika dilihat fungsi akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban, maka pihak yang dituju oleh informasi adalah pihak-pihak yang dituju oleh pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. Berdasarkan karakteristik sistem perekonomian Indonesia, ada tiga kelompok pihak yang berkepentingan terhadap pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan, yaitu investor dan kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum.

1. Tanggung Jawab Manajemen kepada Investor dan Kreditor

Investor dan kreditor adalah pihak yang memiliki dan menanamkan dananya ke dalam suatu perusahaan. Manajemen bertanggung jawab kepada investor dan kreditor atas pengelolaan dana tersebut, baik mengenai keselamatan maupun tingkat kembalian (biasanya diukur dengan laba). Bagi calon investor, sebelum mengambil keputusan investasi perlu menimbang mengenai informasi profitabilitas dan solvabilitas perusahaan. Informasi tersebut diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian prospek perusahaan di masa datang, yang berhubungan dengan tingkat risiko investasi. Kreditor juga perlu menimbang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban atas kredit yang diberikan. Kepentingan investor dan kreditor terhadap suatu pengelolaan perusahaan hanya terbatas pada likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas, yang merupakan ukuran-ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada investor dan kreditor, serta prediksi harga pasar sekuritas di pasar modal.

Tujuan pelaporan keuangan dalam PAI 1984 dan SAK 1994 sudah mencakup kepentingan investor dan kreditor, tetapi tujuan pelaporan keuangan yang hanya menitikberatkan fokus informasi bagi kepentingan investor dan kreditor belumlah lengkap. Tanggung jawab perusahaan tidak terbatas hanya kepada investor dan kreditor saja.

2. Tanggung Jawab Manajemen kepada Pemerintah

Pemerintah adalah pemegang otoritas dalam menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sistem ekonomi mekanisme campuran pemerintah juga berhak untuk intervensi ke dalam pasar melalui kebijakan-kebijakan ekonomi. Pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat yang mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Di samping itu pemerintah juga berhak untuk mengatur mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas suatu perusahaan terhadap lingkungan. Dengan demikian pengelola suatu unit usaha mempunyai tanggung jawab kepada pemerintah. Ketaatan pengelola perusahaan terhadap peraturan-peraturan pemerintah merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengungkapkannya.

Sehubungan dengan tanggung jawab manajemen kepada pemerintah, akuntansi konvensional baru bisa memenuhi laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pemerintah dalam hal perpajakan. Sempitnya tujuan pelaporan keuangan dalam PAI 1984 maupun SAK 1994 menyebabkan akuntansi konvensional tidak mampu menjadi alat pertanggungjawaban dalam hal dampak sosial aktivitas suatu perusahaan.

3. Tanggung Jawab Manajemen kepada Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok besar yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. FASB dalam SFAC No.1 menyebutkan kelompok masyarakat luas ini sebagai *potential users and their interests* (para.24). Kelompok masyarakat terdiri dari pemilik, pemberi pinjaman, pemasok, calon investor dan kreditor, pekerja, pelanggan, analis keuangan, penjamin dan broker saham, pasar modal, ahli hukum, ahli ekonomi, media masa, serikat buruh, asosiasi perdagangan, pengajar (dosen) akuntansi dan siswanya, dan masyarakat umum.

Aktivitas suatu unit usaha tidak bisa lepas dari lingkungan sosialnya. Perusahaan menggunakan sumber daya alam sebagai bahan olah untuk menghasilkan barang/jasa. Perusahaan juga menimbulkan polusi udara, air dan tanah. Perusahaan menggunakan sumber daya manusia sebagai motor penggerak aktivitasnya. Kesehatan dan kesejahteraan para karyawan adalah faktor yang tidak bisa dikesampingkan. Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk berlaku adil terhadap karyawannya. Undang-undang tentang lingkungan hidup dan perburuhan membatasi aktivitas perusahaan agar tidak berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan alam maupun sosial. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan sosial

ekonomi nasional yang juga merupakan tujuan semua pelaku ekonomi dan masyarakat.

Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat luas merupakan satu sisi yang belum tercakup dalam tujuan umum laporan keuangan PAI 1984 dan SAK 1994. Pertanggungjawaban sosial perusahaan menuntut agar akuntansi tidak hanya merupakan pengkomunikasian informasi, hasil transaksi perusahaan yang berupa pertukaran benda atau jasa antara dua/lebih kesatuan ekonomi (Belkoui 1981, hal. 248). Pertukaran antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya juga merupakan aspek yang harus diungkap dan dilaporkan oleh media akuntansi. Pengembangan tujuan pelaporan keuangan yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai pelaku ekonomi adalah hal yang sangat mendesak, agar akuntansi tidak kehilangan satu sisi fungsinya sebagai alat pertanggungjawaban.

Rumusan Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis mengajukan suatu rumusan tujuan pelaporan keuangan yang mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan karakteristik sistem perekonomian Indonesia dan tuntutan arus globalisasi.

1. Tujuan untuk Memenuhi Kepentingan Investor dan Kreditor (diadopsi dari SFAC No.1 para.34, 37, dan 40)
 - A. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, calon investor dan kreditor, serta pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain sejenisnya secara rasional.
 - B. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, calon investor dan kreditor, serta pemakai lain dalam mengevaluasi jumlah, saat, dan ketidakpastian penerimaan kas yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan penjualan, penebusan atau pelunasan surat berharga atau pinjaman.
 - C. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ekonomi kepada pihak lain yang berhak dan pemilik ekuitas), dan pengaruh transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan yang mempengaruhi komposisi dan jumlah sumber-sumber ekonomi tersebut serta klaim atas sumber-sumber ekonomi tersebut.

2. Tujuan untuk Memenuhi Kepentingan Pemerintah dan Masyarakat Luas

- A. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan.
- B. Menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya.
- C. Menyediakan informasi mengenai manfaat sosial (*social benefit*) dan biaya sosial (*social cost*) yang ditimbulkan akibat operasi perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu.

PENUTUP

Rumusan tujuan pelaporan keuangan sebagaimana di atas akan membawa konsekuensi pada pelaporan keuangan yang lebih luas daripada laporan keuangan konvensional. Pelaporan keuangan suatu perusahaan akan terdiri dari laporan neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Laporan neraca, laporan rugi-laba, dan laporan perubahan posisi keuangan merupakan media untuk memenuhi kepentingan investor dan kreditor serta pemakai lain, dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit dan keputusan ekonomi lainnya yang relevan.

Laporan pertanggungjawaban sosial merupakan media untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan kepada pihak pemerintah dan masyarakat luas. Pihak pemakai laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan akan menggunakan laporan tersebut sebagai alat bantu untuk mengevaluasi kelayakan operasi perusahaan dibandingkan dengan dampak positif dan negatif terhadap kualitas lingkungan alam dan sosial. Dengan dimasukkannya kepentingan masyarakat dan pemerintah ke dalam tujuan pelaporan keuangan perusahaan, maka laporan pertanggungjawaban sosial mempunyai kedudukan yang kuat sebagai bagian dari pelaporan keuangan eksternal perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkoui, Ahmed. *Accounting Theory*. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1981.
- Burton, Eric James. "Toward A Theory of Corporate Social Accounting: A Comment." *The Accounting Review*, October 1977: 971-976.
- Dopuch, Nicholas dan Sunder, Shyam. "FASB's Statements on Objectives and Elements of Financial Accounting: A Review." *The Accounting Review*, January 1980: 1-21.

- FASB. SFAC No 1: *Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*. Stamford Connecticut: November 1978.
- Grady, Paul. *Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises*. New York: AICPA, 1965.
- Harahap, Sofyan Syafri. "Pengantar Menuju Socio-Economic Accounting." *Majalah Akuntansi*, Juni 1987: 48-56.
- Hendriksen, Eldon S. *Accounting Theory*. Ed.3. Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1977.
- Horngren, Charles T. "The Marketing of Accounting Standards." *Journal of Accountancy*, October 1973: 61-66.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- ISEI. *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: 15-8-1990.
- Jusup, Al. Haryono. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi 4. Yogyakarta: STIE YKPN, 1992.
- Kirk, Donald J. "How to Keep Politics Out of Standard setting: Making Private Sector Rule Making Work." *Journal of Accountancy*, September 1978: 92-94.
- Linowes, David F. "The Need for Accounting in Developing Social System." *Journal of Accountancy*, March 1970: 62-65.
- _____. "Socio-Economic Accounting." *Journal of Accountancy*, November 1968: 37-42.
- May, Robert G. dan Sundem, Gary L. "Research for Accounting Policy: An Overview." *Accounting Review*, October 1976: 747-763.
- Most, Keneth S. *Accounting Theory*. Columbus Ohio: Grid Publishing Inc., 1982.
- Most, Keneth S., dan Winters, Arthur L. "Focus on Standard Setting: From Trueblood to The FASB", *Journal of Accountancy*, February 1977: 67-75.
- Rappaport, Alfred. "Economic Impact of Accounting Standard Implication for The FASB." *Journal of Accountancy*, May 1977: 89-98.
- Seidler, Lee J. dan Seidler, Lynn L. *Social Accounting: Theory, Issues and Cases*. California L.A.: Melville Publishing Company, 1975.
- Solomons, David. "The Impact of Politics on Accounting Standard." *Journal of Accountancy*, November 1978: 65-72.

- Sudibyo, Bambang. "Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya di Indonesia." *Majalah Akuntansi*, Juni 1987: 36-47.
- Surma, John P. dan Vondra, Albert A. "Accounting for Environmental Costs: A Hazardous Subject." *Journal of Accountancy*, March 1992: 51-55.
- Suwaldiman. "Tujuan Pelaporan Keuangan: Perbandingan antara SFAC No.1 dengan SAK 1994", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE YKPN*, Agustus 1995: 55-61.
- Suwardjono. "Perekayasaan Informasi Akuntansi untuk Alokasi Sumberdaya Secara Efisien Melalui Pasar Modal." *Majalah Akuntansi*, Desember 1990: 35-45.
- Suwardjono. *Akuntansi Pengantar 1: Konsep Penyusunan Laporan Keuangan, Pendekatan Sistem dan Terpadu*. Yogyakarta: BPF, 1989.
- Suwardjono. *Seri Teori Akuntansi: Perekayasaan Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: BPF, 1989.
- Tuanakota, Theodorus M. "Rerangka Konseptual dan Penyusunan Standard Akuntansi." *Konvensi Nasional Akuntansi ke-2*, Yogyakarta Desember 1992.
- Wibisana, M. Yusuf. "Kerangka Konseptual dan Penyusunan Standard Akuntansi." *Konvensi Nasional Akuntansi ke-2*, Yogyakarta, Desember 1992.

Lampiran : Contoh Laporan Pertanggungjawaban sosial:**1. Model Linowes:****XXXX Corporation: Socio-Economic Operating Statement
for the Year Ended December 31, 1971****I. Relations with People****A. Improvements:**

1. Training program for handicapped workers	\$ 10,000
2. Contribution to educational institutions	4,000
3. Extra turnover costs because of minority hiring program	5,000
4. Cost of nursery school for children of employees, voluntary set up	<u>11,000</u>
Total Improvements	\$ 30,000

B. Less: Detriments

1. Postponed installing new safety devices on cutting machines (cost of the devices)	<u>14,000</u>
---	---------------

C. Net Improvements in People Actions for the year	<u>\$ 16,000</u>
--	------------------

II. Relations with Environment:**A. Improvements:**

1. Cost of reclaiming and landscaping old dump on company property	\$ 70,000
2. Cost of installing pollution control devices on Plant A smokestacks	4,000
3. Cost of detoxifying waste from finishing process this year	<u>9,000</u> \$ 83,000

B. Less: Detriments

1. Cost that would have been incurred to relandscape strip mining site used this year	\$ 80,000
2. Estimated cost to have installed purification process to neutralize poisonous liquid being dumped into stream	<u>100,000</u> \$180,000

C. Net Deficit in Environment Actions for the year	<u>(\$ 97,000)</u>
--	--------------------

III. Relations with Products:**A. Improvements:**

1. Salary of V.P. while serving on government Safety Commission	\$ 25,000
2. Cost of substituting lead-free point for previously used poisonous lead point	<u>9,000</u>
Total Improvements	\$ 34,000

B. Less Detriments

1. Safety device recommended by Safety Council but not added to product	<u>22,000</u>
C. Net improvements in product actions for the year	<u>\$ 12,000</u>

Total Socio-Economic Deficit for the Year	<u>(\$ 69,000)</u>
---	--------------------

Add: Net Cumulative Socio-Economic Improvements as at January 1, 1971	<u>249,000</u>
---	----------------

GRAND TOTAL NET SOCIO-ECONOMIC ACTIONS TO DEC. 31, 1971 \$ 180,000

(Sumber: Linowes, David F. An Approach to Socio-Economic Accounting, Conference Board, November 1972, hal. 60.)

2. Model Estes

XYZ Corporation (Corporate Social Report)
For the Year Ended December 31, 1984

Social Benefit:

Product and services produced		\$ xxx
Payments to other elements of society:		
Employment provided (salaries and wages)	\$ xxx	
Payments for goods and other services	xxx	
Taxes paid	xxx	
Contributions	xxx	
Dividends and interest paid	xxx	
Other payments	<u>xxx</u>	xxx
Services to employees	xxx	
Improvements in environment		xxx
Staff services donated to others		xxx
Equipment and facility services donated	xxx	
Other benefits		<u>xxx</u>
Total Social Benefits		\$ xxx

Social Costs:

Human services used	\$ xxx	
Raw material purchases		xxx
Building and equipment purchases	xxx	
Other goods and materials used		xxx
Payments from other elements of society:		
Payments to company for goods and services	\$ xxx	
Additional capital investments	xxx	
Loans	xxx	
Other payments	<u>xxx</u>	xxx
Environment damage:		
Terrain damage	xxx	
Air pollution	xxx	
Water pollution	xxx	
Noise pollution	xxx	
Solid waste	xxx	
Visual pollution	xxx	
Other environmental damage	<u>xxx</u>	xxx
Public services used	xxx	
Public facilities used	xxx	
Work related injuries and illness		xxx
Other social costs	<u>xxx</u>	
Total Social Costs		<u>xxx</u>
Social Surplus (Deficit) for the Year		\$ xxx
Accumulated Surplus (Deficit) for Company, Dec. 31, 1983		<u>xxx</u>
Accumulated Surplus (Deficit) for Company, Dec. 31, 1984		\$ xxx

Standard Footnotes:

1. Significant secondary effects associated with inputs.
2. Significant secondary effects associated with outputs.
3. Environmental protection outays and activities.
4. Employment and promotion of minorities anf women.
5. Bases for measurements and estimates.

(Sumber: Estes, Ralph W. "A Comprehensive Corporate Social Reporting Model." Dalam *Social Accounting: Theory, Issues and Cases*. Lee J. Seidler dan Lynn L. Seidler, Melville Publishing Company, LA, California, 1975, hal. 194-195)